Universitas Lambung Mangkurat - Banjarmasin

Problem dan Konflik Implementasi Otonomi Daerah di Kota Banjarmasin
(Problems and Conflicts in Implementing Regional Autonomy in
Banjarmasin City)

Decentralization Workshop II
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization
(Lokakarya Kedua Untuk Meningkatkan Kesanggupan Universitas
Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

PROBLEM DAN KONFLIK
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
DI KOTA BANJARMASIN

Drs.Suryani,MA
M.Effendy,SH,MH
Drs.M.Handry Imansyah,MAM

Tim Kajian Desentralisasi
Fak. Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Jakarta, 5 Juni 2000

namun masih banyak hal yang memerlukan penterjemahan dan pengkajian lebih lanjut agar implementasi otonomi daerah dapat berjalan dengan meminimalkan problem dan konflik.

2. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Provinsi Kalimantan Selatan.

Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 33.377,5km² berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa dan Selatan Makasar. Propinsi ini merupakan propinsi terkecil dalam wilayah Kalimantan. Propinsi Kalimantan Selatan secara administratif terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota dengan Kota Banjarmasin sebagai Ibukotanya.

Propinsi ini dihuni oleh berbagai suku dimana sebagian besar adalah suku Banjar, Bugis dan Jawa. Berdasarkan Sensus Penduduk 1990 propinsi ini memiliki penduduk sekitar 1.2 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk selama dasawarsa 1980-1990 setinggi 2,34% pertahun diperkirakan penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2000 ini berjumlah 1.600.000 jiwa.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai potensi meliputi perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan serta pertambangan (galian logam dan non logam).

Prasarana dan sarana transportasi *darat* telah berkembang dengan baik. Semua kota dan kabupaten dapat dihubungkan dengan jalan darat dengan kondisi jalan cukup baik. Hubungan darat antara Kal.Sel dengan Kal.Tim berjalan lancar dan dengan Kal.Tengah dihubungkan oleh Jembatan Barito dengan panjang 1.082 m. Pelayanan pelayaran antar pulau semakin berkembang dengan adanya Pelabuhan Samudera Batu Licin, Pelabuhan Martapura Baru, Pelabuhan Tri Sakti, Pelabuhan Mekar Putih, Pelabuhan Tanjung Pemancingan dan Stagen. Pelayanan angkutan udara dilakukan

melalui Bandara Umum Syamsuddin Noor (bisa didarati oleh DC9 dan Boeing 737), Bandara khusus perusahaan yaitu Bandara Warukin, Bandara Stagen dan Bandara Batu Licin (khusus untuk perusahaan). Tenaga listrik dipasok dari sistem Barito 78,8 MW, PLTA Kusan Hilir 12 MW dan PLTU Asam Asam 2 x 24 MW.

Distribusi PDRB per Sektor
Propinsi Kalimantan Selatan
1996-1998

Sektor	1996	1997	1998
Pertanian	21,55	20,64	21,35
Pertambangan & Penggalian	10,45	11,19	14,36
Industri Pengolahan	21,18	20,99	20,91
Listrik & Air Minum	1,20	1,27	1,41
Bangunan	5,99	6,22	4,50
Perdagangan, Rest & Hotel	16,59	15,90	14,12
Pengangkutan & Komunikasi	9,88	10,13	10,56
Keuangan, Sewa & Jasa Prshn	4,53	5,12	3,77
Jasa Jasa	8,64	8,54	9,02
Jumlah (Nilai PDRB- Rp jutaan)	100,00 5,956,540	100,00 6,228,621	100,00 5,759,664

Perekonomian di Kalimantan Selatan berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB didominasi oleh sektor Pertanian dan diikuti oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Pertambangan & Penggalian, sektor Pengangkutan & Komunikasi. Dampak krisis ditahun 1998 adalah lebih rendahnya PDRB ditahun tersebut daripada tahun tahun sebelumnya.

2.2. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin secara **geografis** dengan luas wilayah 72 km² merupakan 6,95% dari seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Kota ini berada dibagian selatan dari Propinsi dan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Selain terdapat puluhan sungai kecil di Kota Banjarmasin, kota ini dibelah oleh sungai besar yaitu Sungai Martapura yang bermuara ke sungai yang terbesar di Kalimantan yaitu Sungai Barito. Kondisi ini memberi warna khusus kepada kehidupan masyarakat sehingga kota ini terkenal sebagai kota pelabuhan (pelabuhan antar pulau dan negara), kota dagang, kota pendidikan, kota pariwisata dan sekaligus ibukota Propinsi Kalimantan Selatan juga terkenal sebagai kota air. Selain itu Kota Banjarmasin terkenal pula sebagai kota asin karena pada saat musim kemarau panjang airnya menjadi asin sebagai akibat intrusi air Laut Jawa. Untuk keperluan air tawar PDAM selain menggantungkan pada air irigasi Riam Kanan juga mengambil air dari daerah hulu Sungai Martapura.

Secara **administratif** Kota Banjarmasin dibagi kedalam empat kecamatan (Kecamatan Banjar Utara, Kecamatan Bajar Timur, Kecamatan Banjar Selatan dan Kecamatan Banjar Barat) satu perwakilan kecamatan dan 50 kelurahan.

Berdasarkan **penggunaannya**, bagian terbesar tanah di Kota Banjarmasin digunakan untuk pertanian (46,59%), diikuti oleh perum

ahan (40,07%), pelayanan jasa (5,67%), perusahaan (4,15%) dan industri (3,52%).

Penduduk Kota Banjarmasin berjumlah 481 373 jiwa pada tahun 1990. Dengan pertumbuhan sebesar 2,66% pertahun maka diperkirakan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 1998 berjumlah 550.606 jiwa atau merupakan 18,3% dari total penduduk di Kalimantan Selatan (3005.164).

Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 1995 diperkirakan 7733 jiwa per km² dengan urutan tertinggi pada Kecamatan Banjar Barat (19141 jiwa per km²), Kecamatan Banjar Timur (12248 jiwa per km²), Kecamatan Banjar Selatan (4684 jiwa per km²) dan Kecamatan Banjar Utara (4452 jiwa per km²).

Sebagai ibukota propinsi, penduduk Kota Banjarmasin relatif mempunyai pendidikan lebih baik daripada kabupaten kabupaten. Menurut Susenas 1996 dari kelompok penduduk diatas lima tahun terdapat 7,53% yang belum tamat SD; 5,91% Tamat SD; 16,55% Tamat SLP dan SLTA dan 2,21% berpendidikan tinggi.

PDRB berdasarkan harga konstan Kota Banjarmasin, seperti halnya di Propinsi Kalimantan Selatan, mengalami penurunan ditahun 1998 sebagai akibat krisis yang melanda negara.

Distribusi PDRB per Sektor
Kota Banjarmasin
1996-1998

Sektor	1996	1997	1998
Pertanian	1,28	1,27	1,46
Pertambangan & Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	29,17	28,62	31,06
Listrik & Air Minum	2,80	2,62	3,06
Bangunan	9,91	8,38	6,58
Perdagangan, Rest & Hotel	18,18	17,34	17,70
Pengangkutan & Komunikasi	22,75	23,00	24,89
Kuangan, Sewa & Jasa	8,80	11,74	7,69
Prshn	7,10	7,03	7,55
Jasa Jasa			
J u m l a h	100,00	100,00	100,00
(Nilai PDRB- Rp jutaan)	1.331.368,6	1.421.939,2	1.244.671, 2

Berbeda dengan gambaran propinsi, ekonomi Kota Banjarmasin didominasi oleh sektor Industri Pengolahan diikuti oleh sektor Pengangkutan & Komunikasi, sektor Perdagangan, Restoran & Hotel (sektor pertambangan tidak ada).

3. SITUASI, KONDISI DAN PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Kelembagaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Banjarmasin dulunya disebut Kotamadya Banjarmasin dengan pimpinan seorang Walikota dan Sekretaris disertai tiga orang asisten masing masing dibidang Tatapraja, Administrasi Pembangunan dan Administrasi. Kotamadya Banjarmasin memiliki 16 buah dinas, 12 badan/kantor. Disamping itu terdapat sejumlah kantor berbagai Departemen dengan daerah operasi pada level Kotamadya.

Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan penataan kembali lembaga lembaga yang ada yang dikaitkan dengan pelimpahan wewenang yang bisa dilakukan. Pemerintah Kota Banjarmasin mencoba melirik 17 dinas yang sudah ada untuk direvisi menjadi sekitar 20 dinas termasuk likuidasi kandep kandep.

Disamping itu Pemerintah Kota akan melakukan penataan sekretariat daerah dengan menghapus kedudukan asisten asisten. Sebagai gantinya akan dibentuk sekitar enam biro pada sekretariat kota dan empat bagian pada sekretariat DPRD.

Dari "rancangan" diatas, Pemerintah Kota telah melakukan beberapa terobosan sebagai berikut :

- (1) Pembentukan Dinas Informasi dan Komunikasi dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 16 Mei 2000 (mendahului Perda).
- (2) Pembentukan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota (mendahului Perda) tertanggal 16 Mei 2000 (mendahului Perda).
- (3) Penetapan Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan Banjar Tengah (baru persetujuan DPRD).
- (4) Pembentukan Forum Perkotaan yang bertugas sebagai mediator antara Pemerintah Kota dengan Masyarakat dalam penyampaian usulan serta pelaksanaan pembangunan dengan SK Walikota tanggal 13 Mei 2000.

3.2. Kepegawaian.

Jumlah pegawai pada Kotamadya Banjarmasin seluruhnya adalah 1459 orang termasuk 641 orang pegawai dari Kantor Departemen. Pengelompokan pegawai berdasarkan golongan adalah sbb:

Golongan	Kota Bjm	Kandep
I	104	10
II	846	182
III	588	430
IV	18	19
Jumlah	1546	641

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pegawai Kota Banjarmasin berpendidikan paling tinggi SLTA. Untuk pasca sarjana terdfapat tiga orang dan pemerintah kota

sedang merencanakan untuk mengirim paryawannya pada sekolah pasca sarjana.

Pengelompokkan pegawai menurut jenis pelatihan adalah sbb:

Yang memenuhi Mengikuti Persyaratan (%)	Jumlah	Yang Sudah (Jumlah)
SPADA/ADUM/ADUMLA 90,3	754	681
SPADYA/SPAMA 10,6	582	62
SPAMEN/SESPA 2,8	69	2
SPATI 0	18	0
Jumlah	1405	745

Dalam rangka likuidasi Kantor Penerangan dan Kantor Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Banjarmasin menempatkan karyawan pada kedua kandep tersebut pada Dinas yang baru dibentuk yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

3.3. Keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin selama periode 1995 - 1999 mengalami kenaikan terus namun ditahun 2000 menurun sebesar %. Penerimaan Asli Daerah (PAD) jumlahnya juga meningkat setiap tahun namun dilihat dari prosentasenya terhadap APBD terlihat adanya penurunan kontribusi PAD selama peridoe 1995-1999

namun ditahun berikutnya yaitu tahun 2000 mengalami kenaikan (lihat tabel dibawah).

Tahun	APBD	PAD	REALISASI PAD	
			Jumlah	%Thd APBD
1995/1996	62.797.439	9.599.432	9.836.836,9	(15,28)
1996/1997	65.517.000	11.126.515	11.329.300,8	(16,98)
1997/1998	90.120.999	12.361.765	9.944.654,8	(13,71)
1998/1999	94.479.169	12.268.463	11.069.585,8	(12,98)
1999/2000	87.667.430	15.049.792	12.866.135,9	(17,16)

Dari sisi pembiayaan Pemerintah Kota mengalami penurunan dalam Penerimaan Asli Daerah dengan adanya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0209 Tahun 1998 tentang pencabutan sumbangan sebagian hasil penerimaan PKB dan BBNKB kepada Daerah Tingkat II dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk peningkatan PAD terdapat dua jalur yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk ekstensifikasi Pemerintah Kota telah mengupayakan hal hal berikut:

- (1) Mengusulkan agar Pajak Kendaraan Bermotor yang tadinya dikelola oleh Propinsi supaya khusus untuk wilayah Kota Banjarmasin diserahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin atau paling tidak Pemerintah Kota mendapat bagian 20% dari hasil penerimaan PKB dan BBNKB (Surat Walikota kepada Gubernur tanggal 29 April 2000).
- (2) Meminta persetujuan DPRD untuk tidak memberlakukan UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.4. Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terdiri atas 45 orang anggota dengan tiga besar partai berturut turut adalah PDIP, PAN dan PPP dan partai partai lainnya. Dari seluruh anggota legislatif hanya sebagian kecil yang berpengalaman dengan urusan politik dan pemerintah. Mereka ini terutama berasal dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

4. SWOT DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

4.1. ANALISIS SWOT.

4.1.1. STRENGTH.

Kota Banjarmasin memiliki berbagai kekuatan dalam gerak pembangunan karena ia merupakan kota pelabuhan (pelabuhan internasional), kota dagang, kota pariwisata, kota pendidikan, kota industri dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan (ibukota propinsi). Letaknya yang strategis merupakan pintu gerbang untuk lintas Jawa ke daerah daerah di Kalimantan Selatan termasuk wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Dikota ini terdapat dua perguruan tinggi negeri (UNLAM dan IAIN) dan beberapa PTS yang telah berkembang dengan baik. Fasilitas perdagangan terutama dunia perbankan tumbuh subur seiring dengan perkembangan ekonomi.

4.1.2. WEAKNESSES

Kota Banjarmasin sebagai kota tua dengan berbagai predikat yang sudah disebut diatas telah tumbuh tanpa dapat ditata secara baik. Lahannya terbatas (luasnya cuma 72 km²) dimana sebagian besar berawa. Kepadatan penduduknya tinggi (7732 jiwa per km²) dan sebagian besar pencari kerja merupakan penduduk dengan pendidikan kurang relevan dengan kebutuhan

lapangan kerja. Begitu juga aparat pemerintahan sebagian besar paling tinggi cuma lulusan SLTA (76%). Sebagaimana daerah lain, aparat belum berpengalaman dengan masalah otonomi daerah. Dari segi pembiayaan Penerimaan Asli Daerah masih kurang mendukung mengingat porsi berada dibawah 20% dari nilai APBD.

4.1.3. OPPORTUNITIES

Melimpahnya potensi sumber daya alam yang terdapat diberbagai daerah kabupaten baik di Propinsi Kalimantan Selatan sendiri maupun Propinsi Kalimantan Timur dan Tengah membuka peluang besar bagi aktivitas industri, perdagangan dan transportasi baik darat maupun air. Peluang ini diperkuat pula dengan datangnya era globalisasi.

4.1.4. THREATS

Ancaman bisa muncul sebagai akibat ketidakjelasan peraturan perundangan tentang Otonomi Daerah baik menyangkut Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Konflik kewenangan akan muncul terutama konflik dengan pemerintah daerah maupun dengan Pemerintah Propinsi.

4.2. STRATEGI IMPLEMENTASI

Dalam implementasi Otonomi Daerah diperlukan serangkaian strategi agar segala upaya yang dilakukan dapat lebih terarah dengan baik. Strategi yang disarankan disini

mencakup lima dari enam elemen pemerintahan yaitu kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan .

a. **Kewenangan dan Kelembagaan.**

Penyerahan kewenangan sebaiknya secara sekaligus. Pelaksanaan kewenangan diserahkan kepada kesiapan dan kemampuan Daerah masing-masing. Apabila penyerahan secara bertahap, dikhawatirkan akan terjadi lagi kemandegan dalam proses penyerahan kewenangan dari Pusat ke daerah.

Secara umum fungsi dan aktivitas Pemerintah Pusat adalah pada pengendalian dan pembuatan pedoman umum. Pemerintah Priopinsi melakukan fungsi koordinasi yang mengatur kepentingan lintas Kabupaten dan Kota, sehingga tercipta kerja sama yang saling menguntungkan sekaligus menghindari konflik yang mungkin terjadi. Sedangkan Kabupaten dan Kota melakukan fungsi pelaksanaan program dan operasional. Pembagian tugas dan fungsi ini harus betul betul dilaksanakan sejak dini.

Problem utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam memasuki era otonomi di bawah UU No.22 Tahun 1999 antara lain adalah adanya kewenangan baru yang harus dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU No.22 Tahun 1999, ada 11 urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah. 11 urusan wajib tersebut ialah; (1) Urusan Pekerjaan Umum, (2) urusan Kesehatan, (3) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, (4) Urusan Pertanian, (5) Urusan Perhubungan, (6) Urusan Industri dan Perdagangan, (7) Urusan Penanaman Modal, (8) Urusan lingkungan hidup, (9) Urusan pertanahan, (10) Koperasi, dan (11) Urusan Tenaga Kerja.

Di antara urusan wajib tersebut, ada yang sudah dilaksanakan karena memang sudah menjadi urusan Daerah, meskipun dengan rincian kewenangan yang terbatas, dan ada pula yang memang merupakan urusan baru yang diserahkan melalui UU No.22 Tahun 1999. Problem tersebut, disatu pihak penyerahan kewenangan tersebut merupakan tuntutan daerah sebagaimana implementasi dari otonomi yang luas, namun pada pihak lain kesiapan dan kemampuan untuk mengelolanya masih terbatas.

Oleh karena itu, meskipun Pemerintah Pusat telah menyerahkan kewenangan wajib tersebut kepada daerah, namun mengingat pelaksanaan dana perimbangan masih dalam proses penjabaran yang lebih rinci, maka sudah seharusnya Pemerintah Pusat tetap harus memberikan dukungan dana melalui APBN dalam tenggang waktu tertentu (1 -2 tahun) terhitung sejak Mei 2001 sebagai tanggal berlaku efektifnya UU No.22 Tahun 1999.

Berkaitan dengan penyerahan kewenangan wajib di atas, restrukturisasi dan reorganisasi kelembagaan harus dilakukan oleh Daerah. Program restrukturisasi dan reorganisasi kelembagaan tersebut menjadi prioritas yang sangat mendesak untuk dilakukan. Pertimbangannya adalah *pertama*, adanya kewenangan baru, dan *kedua*, adanya likwidasi berbagai Kantor Departemen yang ada di Daerah menjadi perangkat daerah, termasuk Departemen yang dihapuskan oleh Pemerintah (Deppen dan Depsos),

Selanjutnya, dalam rangka pembentukan lembaga baru yang nantinya akan melaksanakan secara teknis operasional urusan wajib dan urusan lain yang menjadi kebutuhan daerah, perlu pula

dilakukan kajian yang komprehensif agar lembaga baru tersebut dapat berfungsi secara efisien.

Dalam rangka tuntutan kewenangan yang tadinya dikelola oleh Propinsi seperti kewenangan untuk mengelola Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (lihat butir 3.3) Pemerintah Kota Banjarmasin perlu mengadakan pendekatan kepada Pusat untuk memperhatikan masalah masalah kewenangan antar Propinsi dan Daerah ini.

b. Kepegawaian.

Adanya kewenangan baru dan restrukturisasi serta reorganisasi kelembagaan membawa dampak yang luas terhadap kepegawaian. Terjadinya pembauran pegawai Pemerintah daerah dengan pegawai yang departemennya dilikuidasi perlu penataan yang cermat. Dalam penataan ini diperluakn acuan tertentu sebagai berikut:

Secara horizontal acuan *pertama* yang dipegang adalah berusaha menampung seluruh pegawai hasil likuidasi Departemen Pusat yang ada didaerah dan *kedua* menempatkan mereka sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi tertentu.

Secara vertikal untuk aparat (pegawai) yang di drop ke Daerah selain kedua acuan yang dipersyaratkan pada mobilitas horizontal tersebut diatas disertai pula dengan persyaratan tambahan yaitu Daerah belum memilikinya, atau tenaga yang tersedia tidak mencukupi.

Disamping itu untuk perimbangan dalam penempatan jabatan eselon antara aparat/pegawai Pemerintah Daerah dengan aparat/pegawai Departemen yang dilikuidasi akan dipertimbangkan

pula latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang mereka miliki.

Terhadap pegawai yang dianggap sudah tidak produktif lagi Pemerintah Kota Banjarmasin sebaiknya memberikan tawaran pensiun dini melalui evaluasi yang komprehensif dengan tolok ukur antara lain, jenjang pendidikan, kepangkatan yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk naik karena perlu ada job promosi, dan usia.

Dalam rangka menyiapkan SDM kedepan perlu dibuat analisis SDM untuk perencanaan pelatihan baik yang berifat penjejangan maupun bentuk lain, baik yang bersifat formal atau nonformal.

c. **Keuangan.**

Permasalahan disini menyangkut dua hal yaitu *pertama*, berapa besar dana yang diperlukan untuk membiayai aktivitas atau fungsi dan *kedua*, darimana dana diperoleh.

Berapa besar dana yang diperlukan menyangkut estimasi cost. Persoalan Cost merupakan substansi yang sulit untuk diperoleh mengingat apa yang sudah dikerjakan dimasa lampau lebih banyak merupakan pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah tersedia. Perhitungan Cost saat ini akan menimbulkan banyak bias karena itu perhitungan perlu dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada bidang bidang yang perubahan volume pekerjaannya relatif kecil dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota perlu melakukan estimasi dengan mereview cost yang sudah pernah ada dalam dinas dinas atau kandep kandep serta unit unit kerja lainnya secara seksama. Perbandingan antar dinas

dengan kande akan memberikan highlite bagi estimasi.

Persoalan kedua yang menyangkut darimana dana diperoleh berkaitan dengan besarnya sumber intern (terutama PAD) dan ekstern (perimbangan keuangan pusat dan daerah).

Untuk sumber intern, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi jelas akan lebih digalakkan namun khusus untuk ekstensifikasi upaya ini akan disertai atau kalau mungkin didahului dengan perbaikan ekonomi yang menyangkut rakyat banyak mengurangi kesan negatif dari perluasan dari basis pajak.

Untuk sumber ekstern mengadakan kajian kajian tentang pembagian perimbangan dan mengusulkannya kepada Pusat untuk meninjau ulang formula yang sudah ada. Dalam hal ini aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam penentuan formula adalah jumlah penduduk, luas Daerah, letak geografis, potensi SDA dan SDA buatan yang tersedia, pendapatan perkapita penduduk setempat. Khusus menyangkut SDA perlu diperhatikan (1) dampak yang akan ditimbulkan dalam eksploitasi SDA bagi Daerah penghasil (2) besarnya biaya perawatan sarana umum dalam rangka pengangkutan hasil eksploitasi SDA (3) biaya untuk pengembangan masyarakat sekitar lokasi terutama terhadap SDA yang tidak dapat diganti.

Sasaran yang diprioritaskan hendaknya lebih ditujukan kepada (1) pemerataan dan menumbuhkan perasaan keadilan (2) pemberian tanggung jawab kepada masyarakat daerah (3) percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah penciptaan akuntabilitas Pemerintah Daerah (1) mempersiapkan setiap unit kerja agar Cost minded dalam pembuatan proposal kegiatan (2)

penyertaan peer review dari luar Pemerintah daerah akan proposal kegiatan (4) laporan berkala, selain internal, bagi masyarakat (5) penyertaan tim asistensi dari perguruan tinggi.

d. Perwakilan.

Akuntabilitas pemerintahan kota tidak lepas dari efektivitas kontrol masyarakat. DPRD sebagai pengejawantahan kekuasaan rakyat merupakan lembaga yang harus lebih dipersiapkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan kota. Strategi yang ditempuh dalam pemberdayaan DPRD meliputi hal hal berikut :

- (1) Peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota dewan baik berupa lokakarya (jangka pendek dan jangka panjang), seminar, dialog publik dan studi banding.
- (2) Penguatan keberadaan dewan melalui tim asistensi tim asistensi yang dibentuk baik dari kalangan akademisi maupun dari lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pembuatan dan penerbitan jurnal kegiatan DPRD.

5. PENUTUP.

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan yang cermat. Problem dan konflik antar tingkat pemerintahan tidak dapat dihindarkan namun dapat diminimalkan dengan membuat perencanaan sesuai dengan kapasitas daerah. Dalam menyongsong implementasi otonomi daerah di Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota sudah melakukan berbagai persiapan dan langkah yang pada dasarnya

dapat dikelompokkan menjadi strategi jangka pendek dan strategi panjang.

Dalam jangka pendek dengan adanya pelimpahan wewenang dilakukan berbagai penataan kelembagaan, personel dan keuangan. Untuk jangka panjang penataan lebih banyak ditekankan pada pembinasan SDM termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penggalian sumber sumber keuangan baru.